

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG SOSIAL BUDAYA
TAHUN 2024



PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1. Latar Belakang I-1

 1.2. landasan Hukum I-2

 1.3. Maksud dan Tujuan I-5

 1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG TAHUN
2024 TRIWULAN II (SEMESTER I) II-1

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun
 2024 Triwulan II (Semester I) II-1

 2.2. Analisis Kinerja BAPERLITBANG II-30

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 BAPERLITBANG II-30

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPERLITBANG TAHUN 2024 III-1

 3.1. Tujuan dan Sasaran III-1

 3.2. Program dan Kegiatan III-2

 3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD III-11

 3.4. Dana Indikatif III-12

BAB IV PENUTUP IV-1

 4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.. IV-1

 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Baperlitbang Tahun 2024	II-1
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja Baperlitbang Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.....	II-13
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja Baperlitbang Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024	II-19
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2024	II-23
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2024	II-25
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2024	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	III-3
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024	III-12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2024	II-10
Gambar 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2024 dengan Renja Tahun 2024	II-11
Gambar 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2024 dengan Renja Tahun 2024	II-22
Gambar 3.1	Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Baperlitbang Tahun 2024	III-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat-Daerah).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja OPD adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat

yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat pengguna. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja OPD dapat dilihat keefektifan, pertanggungjawaban dan dampak/manfaat dari pelaksanaan kegiatan, serta terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja BAPERLITBANG Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Karanganyar – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16); Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 162);

27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 119);
28. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 34);
31. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
32. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja BAPERLITBANG Tahun 2024 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur BAPERLITBANG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan untuk urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2024.

4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas.
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja BAPERLITBANG Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja BAPERLITBANG, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja BAPERLITBANG, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja BAPERLITBANG dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra BAPERLITBANG

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan BAPERLITBANG, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran BAPERLITBANG.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja BAPERLITBANG.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja BAPERLITBANG, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG TAHUN 2024
TRIWULAN II (SEMESTER I)**

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Baperlitbang) Tahun 2024 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2024 Triwulan II (Semester I).

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja BAPERLITBANG tahun 2023 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja BAPERLITBANG

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan BAPERLITBANG berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing BAPERLITBANG, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Baperlitbang untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja BAPERLITBANG.

**BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPERLITBANG
TAHUN 2024**

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Baperlitbang Tahun 2024 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan di atasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2024 Triwulan II (Semester I).

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Baperlitbang Tahun 2024-2026 dengan Renja Baperlitbang Tahun 2024;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Baperlitbang untuk Tahun 2024, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Baperlitbang Tahun 2024

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2024		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			9.909.000		8.417.088,44		1.491.911,56
5.01				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			9.909.000		8.417.088,44		1.491.911,56
5.01				Perencanaan			8.950.000		7.767.088,44		1.182.911,56
5.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	6.000.000	100%	5.042.088,539	=	957.911,46
5.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun	100%	125.000	100%	81.632,3	=	43.367,70
5.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 dokumen	95.000	2 dokumen	68.632,3	=	26.367,70
5.01	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	10.000	4 dokumen	3.500	=	6.500,00
5.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	10.000	2 laporan	3.500	=	6.500,00
5.01	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.000	4 laporan	6.000	=	4.000,00
5.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	100%	4.374.700	100%	4.405.214,679	=	-30.514,68
5.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang/bulan	4.311.700	31 orang/bulan	4.370.756,079	=	-59.056,08
5.01	01.2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	1 dokumen	55.000	1 dokumen	30.408,5	=	24.591,50
5.01	01.2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	4 laporan	8.000	4 laporan	4.050	=	3.950,00
5.01	01.2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) brang milik daerah	100%	5.000	100%	3.050	=	1.950,00
5.01	01.2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	5.000	1 laporan	3.050	=	1.950,00

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2024		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	01.2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	100%	170.500	100%	12.988,5	=	157.511,50
5.01	01.2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	5.000	1 dokumen	2.991,5	=	2.008,50
5.01	01.2	05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	8.000	1 dokumen	5.997	=	2.003,00
5.01	01.2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	31 orang	150.000	31 orang	-	=	150.000,00
5.01	01.2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 orang	7.500	31 orang	4.000	=	3.500,00
5.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi	100%	254.800	100%	195.570,86	=	59.229,14
5.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	14.000	1 paket	8.000	=	6.000,00
5.01	01.2	06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	15.000	1 paket	10.000	=	5.000,00
5.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	15.000	1 paket	12.000	=	3.000,00
5.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	15.000	1 paket	10.000	=	5.000,00
5.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	3.500	2 dokumen	2.760	=	740,00
5.01	01.2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan / Material yang dis sediakan	1 paket	18.000	1 paket	12.590,86	=	5.409,14
5.01	01.2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	20.000	1 laporan	12.985	=	7.015,00
5.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	125.000	1 Laporan	110.220	=	14.780,00
5.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10.000	1 dokumen	6.515	=	3.485,00
5.01	01.2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumrn	19.300	1 dokumrn	10.500	=	8.800,00
5.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	100%	550.000	100%	3.250	=	546.750,00
5.01	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	350.000	2 unit	-	=	350.000,00

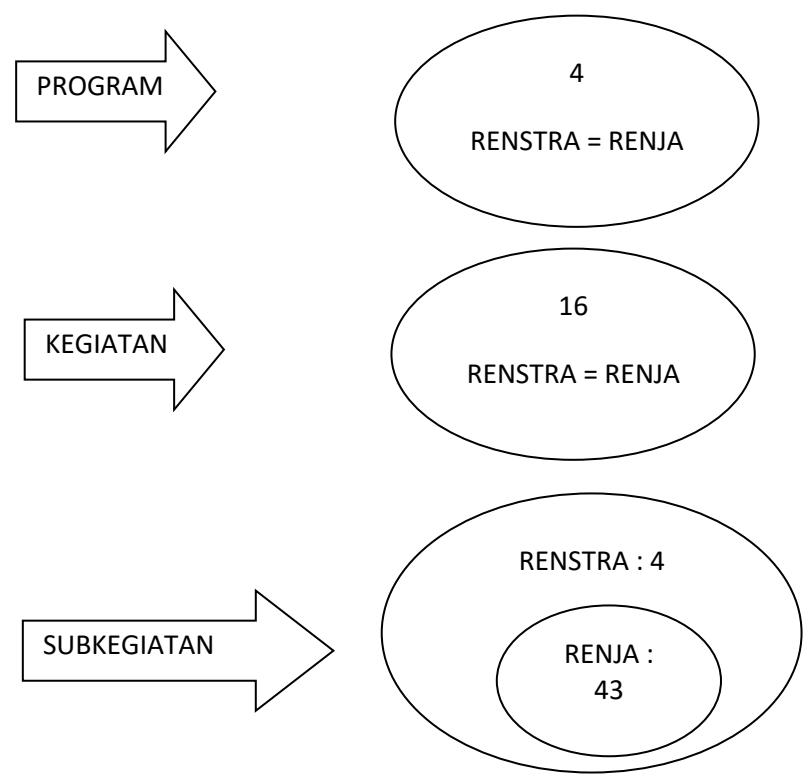
NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2024		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	100.000	8 Unit	3.250	=	96.750,00
5.01	01.2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100.000	-	-	>	100.000,00
5.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100 %	200.000	100%	183.172,2	=	16.827,80
5.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	25.000	1 laporan	22.941	=	2.059,00
5.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	120.000	1 laporan	107.400	=	12.600,00
5.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	55.000	1 laporan	52.831,2	=	2.168,80
5.01	1:02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	320.000	100%	157.210	=	162.790,00
5.01	1:02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	200.000	22 unit	128.330	=	71.670,00
5.01	1:02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50.000	50 unit	28.880	=	21.120,00
5.01	1:02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	70.000	1 unit	-	=	70.000,00
5.01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100%	1.250.000	100%	1.150.000	=	100.000,00
5.01	02.2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	875.000	100%	1.025.000	=	-150.000,00
5.01	02.2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	875.000	3 dokumen	1.025.000	=	-150.000,00
5.01	2:02	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	40.000	100%	25.000	=	15.000,00
5.01	2:02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	40.000	1 Dokumen	25.000	=	15.000,00
5.01	02.2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	335.000	100%	100.000	=	235.000,00

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2024		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5:01	2:02	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4 Laporan	35.000	4 Laporan	25.000	=	10.000,00
5:01	2:02	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	300.000	2 Laporan	75.000	=	225.000,00
5.01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	93%	1.700.000	93%	1.475.000	=	225.000,00
5.01	03.2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	585.000	100%	575.000	=	10.000,00
5.01	03.2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	135.000	4 Laporan	145.825	=	-10.825,00
5.01	03.2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	130.000	1 dokumen	121.810	=	8.190,00
5.01	03.2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	75.000	13 Laporan	142.647	=	-67.647,00
5.01	03.2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia	1 laporan	245.000	1 laporan	164.718	=	80.282,00
5.01	03.2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	550.000	100%	450.000	=	100.000,00
5.01	03.2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	165.000	4 dokumen	110.000	=	55.000,00
5.01	03.2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Laporan	82.500	5 Laporan	10.000	=	72.500,00
5.01	03.2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	302.500	2 laporan	280.000	=	22.500,00
5.01	03.2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	100%	565.000	100%	450.000	=	115.000,00
5.01	03.2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	180.000	1 dokumen	205.000	=	-25.000,00

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2024		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	03.2	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Laporan	85.000	5 Laporan	40.000	=	45.000,00
5.01	03.2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dab Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 laporan	300.000	1 laporan	205.000	=	95.000,00
5.01	5			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	57	959.000	52	550.000	>	409.000,00
					Persentase inovasi yang diimplementasikan	78		50		>	309.000,00
5.05	02.2	01		Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	57%	359.000	57%	50.000	=	309.000,00
5.05	02.2	01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	7 Dokumen	359.000	7 Dokumen	50.000	=	100.000,00
5.05	02.2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	78%	600.000	78%	500.000	=	100.000,00
5.05	02.2	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	8 dokumen	600.000	57 dokumen	500.000	<	4.866.911,46

Sumber : Baperlitbang, 2024

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
 - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
 - Subkegiatan konsistensi sebesar : $(43/47) \times 100\% = 91,49\%$ (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 4 subkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 100% sesuai dengan Renstra, karena semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra. 4 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2024 adalah :

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi : karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD;
- b. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: tidak dilaksanakan di tahun 2024 dan diundur di tahun 2025.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD; dan
- d. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : digunakan untuk menampung kegiatan peningkatan kapasitas Gedung karena adanya penambahan bidang baru dan fasilitas lainnya yang menjadi asset, namun alokasi anggaran tidak mencukupi.

2) Kesesuaian indikator dan target

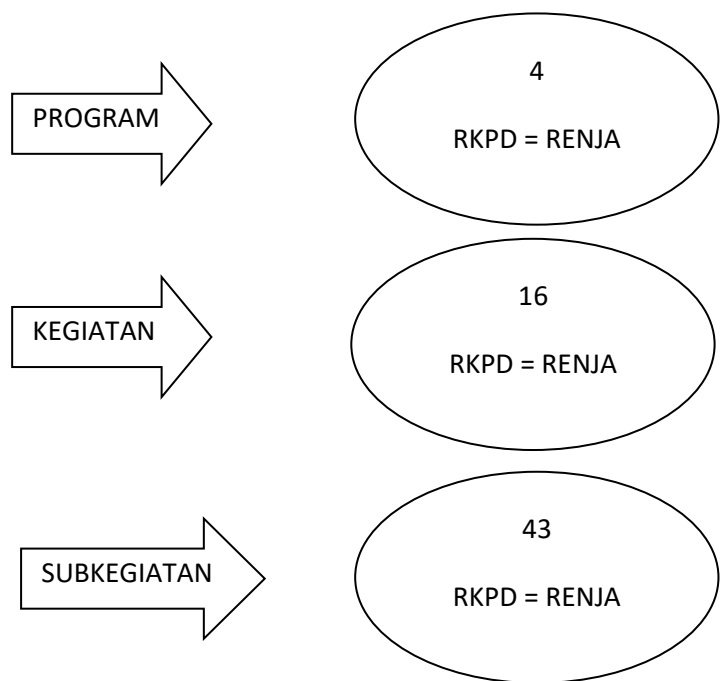
- Terdapat perubahan / perbedaan indikator subkegiatan antara Renja dengan Renstra, yang di renstra satuan unit dalam renja menjadi bulan, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2024. yaitu pada subkegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.8.217.088.539.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp.9.909.000.000.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Baperlitbang;
- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan urusan penelitian dan pengembangan =Rp.409.000.000,-; dan urusan perencana adanya 2 subkegiatan tersebut diatas (Diklat : Rp.150.000.000,- dan Pengadaan kendaraan = Rp. 350.000.000.-).

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2024 dengan Renja Baperlitbang Tahun 2024;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Baperlitbang untuk Tahun 2024, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Baperlitbang dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2024. Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

- 1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - o Program konsistensi sebesar 100% (4 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);

- Kegiatan konsistensi sebesar 100% (16 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
- Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (43 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).

2. Kesesuaian Indikator dan target

- Terdapat banyak ketidaksesuaian indikator yaitu pada subkegiatan: 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator dalam RKPD dengan satuan unit sedangkan dalam Renjadengan satuan bulan, sehingga perlu perbaikan dalam Renja Perubahan 2024.

- Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target RKPD atau sebaliknya Renja lebih kecil dari RKPD, sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian /kondisi riil;

3. Kesesuaian alokasi anggaran

- Terdapat perdaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yaitu sebesar Rp. 8.217.088.539.- dengan Rp. 8.158.032.360.-;
- Perbedaan jumlah pagu indikatif dalam Renja dengan Pagu RKPD yaitu selisih : Rp. 59.056,08.-, lebih banyak Renja, yaitu pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, karena menyesuaikan kebutuhan riil.

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2024 dan Renja Baperlitbang Tahun 2024

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			8.158.032,36		8.217.088,44		-59.056,08
5.01				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			8.158.032,36		8.217.088,44		-59.056,08
5.01				Perencanaan			7.608.032,36		7.667.088,44		-59.056,08
5.01	1			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	4.983.032,36	100%	5.042.088,44	=	-59.056,08
5.01	01.2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun	100%	81.632,30	100%	81.632,30	=	0,00
5.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	4 dokumen	68.632,30	4 dokumen	68.632,30	=	0,00
5.01	01.2	1	4	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	3.500,00	2 dokumen	3.500,00	=	0,00
5.01	01.2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	3.500,00	2 laporan	3.500,00	=	0,00
5.01	01.2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	6.000,00	4 laporan	6.000,00	=	0,00
5.01	01.2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	100%	4.346.158,50	100%	4.405.214,68	=	-59.056,18
5.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 orang/bulan	4.311.700,00	32 orang/bulan	4.370.756,08	=	-59.056,08
5.01	01.2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	12 dokumen	30.408,50	12 dokumen	30.408,50	=	0,00
5.01	01.2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 laporan	4.050,00	12 laporan	4.050,00	=	0,00
5.01	01.2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) brang milik daerah	100%	3.050,00	100%	3.050,00	=	0,00
5.01	01.2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	3.050,00	1 laporan	3.050,00	=	0,00

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	01.2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	100%	12.988,50	100%	12.988,50	=	0,00
5.01	01.2	5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	2.991,50	1 dokumen	2.991,50	>	0,00
5.01	01.2	5	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	5.997,00	1 dokumen	5.997,00	=	0,00
5.01	01.2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	- org	0,00	-	0,00	=	0,00
5.01	01.2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	4.000,00	32 orang	4.000,00	=	0,00
5.01	01.2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi	100%	195.570,86	100%	195.570,86	=	0,00
5.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	8.000,00	1 paket	8.000,00	=	0,00
5.01	01.2	6	2	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	10.000,00	1 paket	10.000,00	=	0,00
5.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	12.000,00	1 paket	12.000,00	=	0,00
5.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	10.000,00	1 paket	10.000,00	=	0,00
5.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2.760,00	2 dokumen	2.760,00	=	0,00
05:01	01.2	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan / Material yang di sediakan	1 paket	12.590,86	1 paket	12.590,86	=	0,00
5.01	01.2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12.985,00	12 laporan	12.985,00	=	0,00
5.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	110.220,00	12 Laporan	110.220,00	=	0,00
5.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	6.515,00	12 dokumen	6.515,00	=	0,00
5.01	01.2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumrn	10.500,00	12 dokumrn	10.500,00	=	0,00
5.01	01.2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	100%	3.250,00	100%	3.250,00	=	0,00

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	01.2	7	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- unit	0,00	-	0,00	=	0,00
5.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	3.250,00	1 Unit	3.250,00	>	0,00
5.01	01.2	7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0,00	-	0,00	=	0,00
5.01	01.2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	12 Bulan	183.172,20	12 Bulan	183.172,20	=	0,00
5.01	01:02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	22.941,00	12 laporan	22.941,00	=	0,00
5.01	01:02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	107.400,00	12 laporan	107.400,00	=	0,00
5.01	01:02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	52.831,20	12 laporan	52.831,20	=	0,00
5.01	01:02	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	157.210,00	100%	157.210,00	=	0,00
5.01	01:02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	128.330,00	12 Bulan	128.330,00	≠	0,00
5.01	01:02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	28.880,00	12 Bulan	28.880,00	≠	0,00
05:01	01:02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0,00	12 Bulan	0,00	≠	0,00
5.01	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100%	1.150.000,00	100%	1.150.000,00	=	0,00
5.01	02.2	1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	1.025.000,00	100%	1.025.000,00	=	0,00
5.01	02.2	1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	1.025.000,00	3 dokumen	1.025.000,00	=	0,00
5.01	02:02	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	25.000,00	100%	25.000,00	=	0,00

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	02:02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	25.000,00	3 Dokumen	25.000,00	=	0,00
5.01	02.2	3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	76%	100.000,00	100%	100.000,00	<	0,00
05:01	02:02	3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4 Laporan	25.000,00	4 Laporan	25.000,00	=	0,00
05:01	02:02	3	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75.000,00	2 Laporan	75.000,00	=	0,00
5.01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	100%	1.475.000,00	100%	1.475.000,00	=	0,00
5.01	03.2	1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	575.000,00	100%	575.000,00	=	0,00
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	145.825,00	4 Laporan	145.825,00	=	0,00
5.01	03.2	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	121.810,00	1 dokumen	121.810,00	=	0,00
5.01	03.2	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	142.647,00	13 Laporan	142.647,00	=	0,00
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia	1 laporan	164.718,00	1 laporan	164.718,00	=	0,00
5.01	03.2	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	450.000,00	100%	450.000,00	=	0,00
5.01	03.2	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	110.000,00	4 dokumen	110.000,00	=	0,00
5.01	03.2	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Laporan	10.000,00	5 Laporan	10.000,00	=	0,00

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu indikatif	Target	Rp
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	3	4	5	6	7	8
5.01	03.2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	280.000,00	2 laporan	280.000,00	=	0,00
5.01	03.2	3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	100%	450.000,00	100%	450.000,00	=	0,00
5.01	03.2	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	205.000,00	1 dokumen	205.000,00	=	0,00
5.01	03.2	3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Laporan	40.000,00	5 Laporan	40.000,00	=	0,00
5.01	03.2	3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dab Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 laporan	205.000,00	1 laporan	205.000,00	=	0,00
5.01	5			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	37	550.000,00	52	550.000,00	<	-
					Persentase inovasi yang diimplementasikan	37		50			
5.05	02.2	1		Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	59 kajian	50.000,00	100%	50.000,00	≠	0,00
5.05	02.2	1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	9 laporan	50.000,00	1 Dokumen	50.000,00	≠	0,00
5.05	02.2	4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	78 buah	500.000,00	100%	500.000,00	≠	0,00
5.05	02.2	4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	9 dokumen	500.000,00	78 dokumen	500.000,00	<	0,00

Sumber : Baperlitbang, 2024

2.1.3. Hubungan antara Renja Baperlitbang Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Baperlitbang untuk Renja Tahun 2024, yaitu terhadap APBD Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024. Hasil evaluasi dapat diketahui kn kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Baperlitbang dengan pagu APBD Tahun 2024. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2024

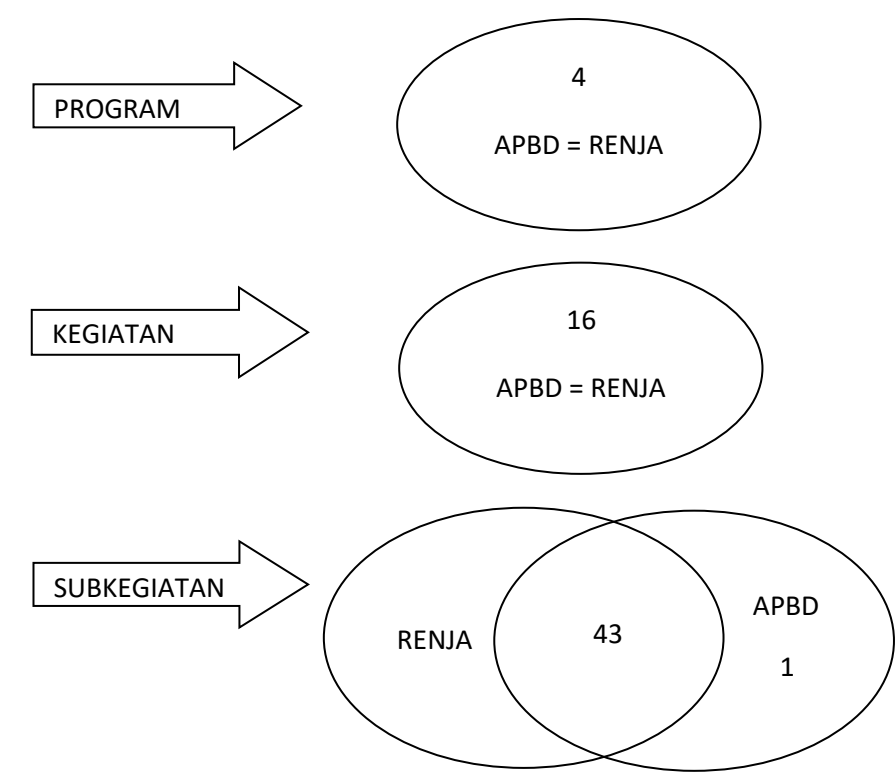
NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu indikatif	Pagu	
						(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1				2		3	4	5
5				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		8.217.088,44	8.417.088,44	102,43%
5.01				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		8.217.088,44	8.417.088,44	102,43%
5.01				Perencanaan		7.667.088,44	7.767.088,44	101,30%
5.01	1			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.042.088,44	5.042.088,44	100,00%
5.01	01.2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		81.632,30	81.632,30	100,00%
5.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah		68.632,30	68.632,30	100,00%
5.01	01.2	1	4	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD		3.500,00	3.500,00	100,00%
5.01	01.2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3.500,00	3.500,00	100,00%
5.01	01.2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.000,00	6.000,00	100,00%
5.01	01.2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.405.214,68	4.405.214,58	100,00%
5.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.370.756,08	4.370.756,08	100,00%
5.01	01.2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		30.408,50	30.408,50	100,00%
5.01	01.2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		4.050,00	4.050,00	100,00%
5.01	01.2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.050,00	3.050,00	100,00%
5.01	01.2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.050,00	3.050,00	100,00%
5.01	01.2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12.988,50	12.988,50	100,00%
5.01	01.2	5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		2.991,50	2.991,50	100,00%
5.01	01.2	5	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		5.997,00	5.997,00	100,00%
5.01	01.2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0,00	0,00	#DIV/0!
5.01	01.2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		4.000,00	4.000,00	100,00%
5.01	01.2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		195.570,86	205.782,06	105,22%
5.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		8.000,00	8.000,00	100,00%
5.01	01.2	6	2	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.000,00	10.011,20	100,11%
5.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistik kantor		12.000,00	22.200,00	185,00%
5.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		10.000,00	10.000,00	100,00%
5.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2.760,00	2.760,00	100,00%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu indikatif	Pagu	%
						(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1				2		3	4	5
05:01	01.2	6	7	Penyediaan Bahan/Material		12.590,86	12.590,86	100,00%
5.01	01.2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12.985,00	12.985,00	100,00%
5.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		110.220,00	110.220,00	100,00%
5.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		6.515,00	6.515,00	100,00%
5.01	01.2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		10.500,00	10.500,00	100,00%
5.01	01.2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.250,00	3.250,00	100,00%
5.01	01.2	7	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0,00	0,00	#DIV/0!
5.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3.250,00	3.250,00	100,00%
5.01	01.2	7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0,00	0,00	#DIV/0!
5.01	01.2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		183.172,20	169.461,00	92,51%
5.01	01:02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat		22.941,00	22.941,00	100,00%
5.01	01:02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		107.400,00	97.200,00	90,50%
5.01	01:02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		52.831,20	49.320,00	93,35%
5.01	01:02	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		157.210,00	160.710,00	102,23%
5.01	01:02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		128.330,00	128.330,00	100,00%
5.01	01:02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		28.880,00	28.880,00	100,00%
05:01	01:02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0,00	3.500,00	#DIV/0!
5.01	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
5.01	02.2	1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.025.000,00	1.025.000,00	100,00%
5.01	02.2	1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		1.025.000,00	1.025.000,00	100,00%
5.01	02:02	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		25.000,00	25.000,00	100,00%
5.01	02:02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		25.000,00	25.000,00	100,00%
5.01	02.2	3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100.000,00	100.000,00	100,00%
05:01	02:02	3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		25.000,00	25.000,00	100,00%
05:01	02:02	3	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		75.000,00	75.000,00	100,00%
5.01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.475.000,00	1.575.000,00	106,78%
5.01	03.2	1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		575.000,00	575.000,00	100,00%
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		145.825,00	145.825,00	100,00%
5.01	03.2	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		121.810,00	121.810,00	100,00%
5.01	03.2	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		142.647,00	142.647,00	100,00%
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		164.718,00	164.718,00	100,00%
5.01	03.2	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam		450.000,00	550.000,00	122,22%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	%
					(Rp. 000)	(Rp. 000)	
1				2	3	4	5
5.01	03.2	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	110.000,00	89.500,00	81,36%
5.01	03.2	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.000,00	60.000,00	600,00%
5.01	03.2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	280.000,00	400.500,00	143,04%
5.01	03.2	3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	450.000,00	450.000,00	100,00%
5.01	03.2	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	205.000,00	205.000,00	100,00%
5.01	03.2	3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000,00	40.000,00	100,00%
5.01	03.2	3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dab Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	205.000,00	205.000,00	100,00%
5.01	4			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	550.000,00	650.000,00	118,18%
5.05	02.2	1		Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	50.000,00	50.000,00	100,00%
5.05	02.2	1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	50.000,00	50.000,00	100,00%
5.05	02.2	4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	500.000,00	600.000,00	120,00%
5.05	02.2	4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	500.000,00	600.000,00	120,00%

Sumber : Baperlitbang, 2024

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :



Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2024 dengan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
 - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
 - Konsistensi Subkegiatan sebesar $= (43/44) \times 100\% = 97,37\%$; terdapat 1 Subkegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam renja yaitu : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dikarenakan adanya keperluan mendadak untuk perbaikan sehingga perubahan alokasi dalam penatapan APBD;
2. Kesesuaian indikator dan target
 - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan, kecuali pada subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
3. Kesesuaian alokasi anggaran
 - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 8.217.088.439,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 8.417.088.439,- ada kenaikan sebesar Rp. 100.000.000.- atau (1,22%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Baperlitbang Tahun 2024

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2024 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2024 BAPERLITBANG melaksanakan 4 program dengan 16 kegiatan dan 44 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp.8.417.088.439,- Sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2024

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			8.417.088,439	3.437.227,530	40,84	37
5.01				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			8.417.088,439	3.437.227,530	40,84	37
5.01				Perencanaan			7.767.088,439	3.321.772,330	42,77	48
5.01	1			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	5.042.088,439	2.695.996,110	53,47	48
5.01	01.2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun	100%	81.632,300	40.408,500	49,50	53
5.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	4 dokumen	68.632,300	35.412,500	51,60	55
5.01	01.2	1	4	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	3.500,000	1.900,000	54,29	55
5.01	01.2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	3.500,000	2.596,000	74,17	75
5.01	01.2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4laporan	6.000,000	500,000	8,33	10
5.01	01.2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	100%	4.405.214,579	2.436.630,412	55,31	55
5.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 orang/bulan	4.370.756,079	2.420.780,412	55,39	55
5.01	01.2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	12 dokumen	30.408,500	15.000,000	49,33	50
5.01	01.2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 laporan	4.050,000	850,000	20,99	25
5.01	01.2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) brang milik daerah	100%	3.050,000	0,000	0,00	0
5.01	01.2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	3.050,000	0,000	0,00	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5.01	01.2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	100%	12.988,500	4.260,500	32,80	43
5.01	01.2	5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	2.991,500	0,000	0,00	0
5.01	01.2	5	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	5.997,000	3.497,000	58,31	60
5.01	01.2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	32 org	0,000	0,000	#DIV/0!	
5.01	01.2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	4.000,000	763,500	19,09	50
5.01	01.2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi	100%	205.782,060	64.280,410	31,24	36
5.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	8.000,000	5.733,350	71,67	75
5.01	01.2	6	2	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	10.011,200	1.681,840	16,80	20
5.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	22.200,000	5.491,500	24,74	50
5.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	10.000,000	1.190,000	11,90	15
5.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2.760,000	920,000	33,33	35
05:01	01.2	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan / Material yang dis sediakan	1 paket	12.590,860	3.649,860	28,99	30
5.01	01.2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12.985,000	6.385,000	49,17	50
5.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	110.220,000	36.302,410	32,94	35
5.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	6.515,000	965,000	14,81	15
5.01	01.2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumrn	10.500,000	1.961,450	18,68	20

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5.01	01.2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	100%	3.250,000	3.200,000	98,46	100%
5.01	01.2	7	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- unit	0,000	0,000		
5.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	3.250,000	3.200,000	98,46	100
5.01	01.2	7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0,000	0,000		
5.01	01.2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	12 Bulan	169.461,000	71.740,638	42,33	50
5.01	01:02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	22.941,000	10.008,950	43,63	50
5.01	01:02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	97.200,000	37.371,688	38,45	50
5.01	01:02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	49.320,000	24.360,000	49,39	50
5.01	01:02	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	160.710,000	75.475,650	46,96	49
5.01	01:02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	128.330,000	67.585,650	52,67	55
5.01	01:02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	28.880,000	7.890,000	27,32	30
05:01	01:02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	3.500,000	0,000	0,00	0
5.01	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100%	1.150.000,000	259.029,370	22,52	25
5.01	02.2	1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	1.025.000,000	234.280,640	22,86	25
5.01	02.2	1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	1.025.000,000	234.280,640	22,86	25

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5.01	02:02	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	25.000,000	7.350,700	29,40	30
5.01	02:02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	25.000,000	7.350,700	29,40	30
5.01	02.2	3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	76%	100.000,000	17.398,030	17,40	18
05:01	02:02	3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4 Laporan	25.000,000	10.285,230	41,14	43
05:01	02:02	3	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75.000,000	7.112,800	9,48	10
5.01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	100%	1.575.000,000	366.746,850	23,29	
5.01	03.2	1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	575.000,000	132.493,110	23,04	26
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	145.825,000	24.370,260	16,71	20
5.01	03.2	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	121.810,000	49.733,050	40,83	45
5.01	03.2	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	142.647,000	4.750,300	3,33	5
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia	1 laporan	164.718,000	53.639,500	32,56	35
5.01	03.2	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	550.000,000	145.760,090	26,50	28

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
5.01	03.2	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	89.500,000	46.332,190	51,77	55
5.01	03.2	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Laporan	60.000,000	4.738,000	7,90	10
5.01	03.2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	400.500,000	94.689,900	23,64	25
5.01	03.2	3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	100%	450.000,000	88.493,650	19,67	21
5.01	03.2	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	205.000,000	47.454,390	23,15	25
5.01	03.2	3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Laporan	40.000,000	1.101,700	2,75	5
5.01	03.2	3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 laporan	205.000,000	39.937,560	19,48	20
5.01	4			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	37	650.000,000	115.455,200	17,76	6
					Persentase inovasi yang diimplementasikan	37				20
5.05	02.2	1		Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	59 kajian	50.000,000	3.218,400	6,44	6
5.05	02.2	1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	9 laporan	50.000,000	3.218,400	6,44	6
5.05	02.2	4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	78 buah	600.000,000	112.236,800	18,71	20
5.05	02.2	4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	9 dokumen	600.000,000	112.236,800	18,71	20

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar s.d Bulan Juni 2024

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2024 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.437.227.530 atau 40,84% dengan realisasi fisik sebesar 32,25%. Untuk urusan perencanaan realisasi keuangan 42,77% dengan capaian fisik 48%, dapat dikatakan sementara uruasan perencanaan berjalan dengan efktif dan efisien, sedangkan urusan penelitian dan pengembangan realisasi anggaran 17,76% sedanglan capaian fisik baru mencapai 13% (rata-rata capaian 2 indikator), sehingga dapat dikatakan kurang efektif dan efisien.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2024

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	8
5				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			37
5.01				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			37
5.01				Perencanaan			48
5.01	1			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	48
5.01	01.2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun	100%	53
5.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	4 dokumen	1. Renja 2025 2. Renja Perub 2024
5.01	01.2	1	4	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	1. RAK 2024 2. DPA 2024
5.01	01.2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	LRA Sem I
5.01	01.2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1. LPT 2023; 2. Lap Sem I
5.01	01.2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	100%	55
5.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 orang/bulan	Gaji dan TPP 32 org selama 6 bulan; dan THR th 2024
5.01	01.2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	12 dokumen	6 dokumen buln Januari- Juni 2024
5.01	01.2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 laporan	1. Lap Tw I 2. Lap Tw II
5.01	01.2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) brang milik daerah	100%	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
1				2	3	4	8
5.01	01.2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Disusun akhir tahun
5.01	01.2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	100%	43
5.01	01.2	5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	Semester I
5.01	01.2	5	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	Disusun akhir tahun
5.01	01.2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	32 org	Belum dianggarkan
5.01	01.2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	 Org yang telah mengikuti sosialisasi.
5.01	01.2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi	100%	36
5.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	Sudah dilaksanakan 75%
5.01	01.2	6	2	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	Sudah dilaksanakan 20%
5.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	Sudah dilaksanakan 50%
5.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	Sudah dilaksanakan 15%
5.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2 koran 6 bl langganan
05:01	01.2	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan / Material yang dis sediakan	1 paket	Sudah dilaksanakan 30%
5.01	01.2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	6 Laporan bulan Januari - Juni
5.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan bulan Januari - Juni
5.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	15% = 2 dokumen?
5.01	01.2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	20% = 3 dokumen?
5.01	01.2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	100%	100
5.01	01.2	7	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- unit	Belum ada alokasi dana
5.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Apa saja?
5.01	01.2	7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	Belum ada alokasi dana
5.01	01.2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	12 Bulan	50
5.01	01:02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Laporan bulan Januari - Juni
5.01	01:02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Laporan bulan Januari - Juni
5.01	01:02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Laporan bulan Januari - Juni

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
1				2	3	4	8
5.01	01:02	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	49
5.01	01:02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	13 unit
5.01	01:02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	15 unit
05:01	01:02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Belum dilaksanakan
5.01	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100%	25
5.01	02.2	1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	25
5.01	02.2	1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	1. RKPD 2025 2. RPJPD 2025-2945 3. RKPD Perub 2024
5.01	02:02	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	30
5.01	02:02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	
5.01	02.2	3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	76%	18
05:01	02:02	3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4 Laporan	1. Lap Koord Dalren 2023 2. Lap Koord Dalren Sem I
05:01	02:02	3	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	1. Lap Evaluasi Sem I
5.01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	100%	
5.01	03.2	1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	26
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	
5.01	03.2	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	
5.01	03.2	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	
5.01	03.2	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia	1 laporan	
5.01	03.2	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	28
5.01	03.2	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan	4 dokumen	

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	8
					RKPD)		
5.01	03.2	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Laporan	
5.01	03.2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	
5.01	03.2	3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	100%	21
5.01	03.2	3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	
5.01	03.2	3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Laporan	
5.01	03.2	3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 laporan	
5.01	4			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	37	6
					Persentase inovasi yang diimplementasikan	37	20
5.05	02.2	1		Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	59 kajian	6
5.05	02.2	1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	9 laporan	
5.05	02.2	4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	78 buah	20
5.05	02.2	4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	9 dokumen	

Sumber : Baperlitbang, 2024

2.2 Analisis Kinerja BAPERLITBANG

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan BAPERLITBANG berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing BAPERLITBANG, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Baperlitbang terlihat adanya :

- Ada beberapa ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indicator dan target;

- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Terdapat 1 subkegiatan yang dialokasikan dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambahkan.
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 8.217.088.439.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 8.417.088.439,- ada kenaikan sebesar 2,43%.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 40,48%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka harapannya paling tidak 50%. Hal ini seringkali disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada semester II, dan pelaksanaan subkegiatan efektif mulai berjala pada bulan Februari.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Baperlitbang untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja BAPERLITBANG. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah dan OPD :
 - a. Keterkaitan tujuan sasaran daerah sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
 - b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; daerah dan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Baperlitbang dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;

6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas BAPERLITBANG juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
2. Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbang) hanya kegiatan formalitas saja
3. Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam mekanisme penganggaran.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Baperlitbang Tahun 2024, pada saat penyusunan Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2024. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Baperlitbang diuraikan pada Bab III.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPERLITBANG

TAHUN 2024

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Baperlitbang Tahun 2024, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2024. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Baperlitbang diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Baperlitbang dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Baperlitbang pada tahun 2024 sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada misi ke-5 yaitu Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024 sesuai dengan rumusan Renstra Baperlitbang Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2024, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator dan targetnya.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Baperlitbang Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2024		Keterangan Naik / turun / =
				Sebelum	Sesudah	
I	Daerah :					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Nilai			
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai			
II	Baperlitbang					
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.	Nilai SAKIP	Nilai	72	72	=
2	Sasaran					
	1) Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	SAKIP	Nilai	72	72	=
	2) Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria	Baik	Baik	=
	3) Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Kriteria	Inovatif	Inovatif	=

Sumber : Baperlitbang, 2024

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2024, tersebut diatas. BAPERLITBANG pada tahun 2024 sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 4 program, 16 Kegiatan dan 45 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2024.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Baperlitbang, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indicator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan BAPERLITBANG di tahun 2024 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2024

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
5				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			8.417.088,44		9.075.259,08	658.170,64	7,82%
5.01				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			8.417.088,44		9.075.259,08	658.170,64	7,82%
5.01				Perencanaan			7.767.088,44		8.425.259,08	658.170,64	8,47%
5.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	5.042.088,44	100%	5.644.071,58	601.983,14	11,94%
5.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun	100%	81.632,30	100%	89.632,30	8.000,00	9,80%
5.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 dokumen	68.632,30	4 dokumen	70.632,30	2.000,00	2,91%
5.01	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	3.500,00	4 dokumen	3.500,00	0,00	0,00%
5.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	3.500,00	2 laporan	5.500,00	2.000,00	57,14%
5.01	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	6.000,00	4 laporan	10.000,00	4.000,00	66,67%
5.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	100%	4.405.214,58	100%	4.699.053,72	293.839,14	6,67%
5.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang/bulan	4.370.756,08	32 orang/bulan	4.660.995,22	290.239,14	6,64%
5.01	01.2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	1 dokumen	30.408,50	12 dokumen	32.408,50	2.000,00	6,58%
5.01	01.2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	4 laporan	4.050,00	12 laporan	5.650,00	1.600,00	39,51%
5.01	01.2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) brang milik daerah	100%	3.050,00	100%	3.050,00	0,00	0,00%
5.01	01.2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	3.050,00	1 laporan	3.050,00	0,00	0,00%
5.01	01.2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	100%	12.988,5	100%	238.762,50	225.774,00	1738,26%
5.01	01.2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	2.991,5	3 dokumen	2.991,50	0,00	0,00%
5.01	01.2	05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	5.997	1 dokumen	5.997,00	0,00	0,00%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
5.01	01.2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	31 org	-	31 org	225.774,00	225.774,00	0%
5.01	01.2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 orang	4.000	31 orang	4.000,00	0,00	0,00%
5.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi	100%	195.570,86	100%	235.939,56	40.368,70	20,64%
5.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	1 paket	8.000	1 paket	8.000,00	0,00	0,00%
5.01	01.2	06	02	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	1 paket	10.000	1 paket	10.011,20	11,20	0,11%
5.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	12.000	1 paket	22.200,00	10.200,00	85,00%
5.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 paket	10.000	1 paket	10.000,00	0,00	0,00%
5.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2.760	2 dokumen	2.760,00	0,00	0,00%
5.01	01.2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan / Material yang dis sediakan	1 paket	12.590,86	1 paket	12.590,86	0,00	0,00%
5.01	01.2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	12.985	1 laporan	18.285,00	5.300,00	40,82%
5.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	110.220	1 Laporan	135.020,00	24.800,00	22,50%
5.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	6.515	1 dokumen	6.572,50	57,50	0,88%
5.01	01.2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	10.500	1 dokumen	10.500,00	0,00	0,00%
5.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	100%	3.250	100%	7.262,50	4.012,50	123,46%
5.01	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	-	2 unit	0	0,00	0%
5.01	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	3.250	8 Unit	7.262,50	4.012,50	123,46%
5.01	01.2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	1 unit	0	0,00	0%
5.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	183.172,2	100%	161.461,00	-21.711,20	-11,85%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
5.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	22.941	1 laporan	22.941,00	0,00	0,00%
5.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	107.400	1 laporan	89.200,00	-18.200,00	-16,95%
5.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	52.831,2	1 laporan	49.320,00	-3.511,20	-6,65%
5.01	1:02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	157.210	100%	208.910,00	51.700,00	32,89%
5.01	1:02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	128.330	22 unit	152.030,00	23.700,00	18,47%
5.01	1:02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	28.880	50 unit	28.880,00	0,00	0,00%
5.01	1:02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	1 unit	28.000,00	28.000,00	0%
5.01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100%	1.150.000	100%	1.145.987,50	-4.012,50	-0,35%
5.01	02.2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	1.025.000	100%	1.025.000,00	0,00	0,00%
5.01	02.2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	1.025.000	3 dokumen	1.025.000,00	0,00	0,00%
5.01	2:02	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	25.000	100%	25.000,00	0,00	0,00%
5.01	2:02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	25.000	1 Dokumen	25.000,00	0,00	0,00%
5.01	02.2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	76%	100.000	76%	95.987,50	-4.012,50	-4,01%
5.01	2:02	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4 Laporan	25.000	4 Laporan	20.000,00	-5.000,00	-20,00%
5.01	2:02	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75.000	2 Laporan	75.987,50	987,50	1,32%
5.01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	93%	1.475.000	93%	1.635.200,00	160.200,00	10,86%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
5.01	03.2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	575.000	100%	625.000,00	50.000,00	8,70%
5.01	03.2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	145.825	4 Laporan	141.025,00	-4.800,00	-3,29%
5.01	03.2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	121.810	1 dokumen	124.200,00	2.390,00	1,96%
5.01	03.2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	142.647	13 Laporan	142.647,00	0,00	0,00%
5.01	03.2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang pembangunan manusia	1 laporan	164.718	1 laporan	217.128,00	52.410,00	31,82%
5.01	03.2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	450.000	100%	560.200,00	110.200,00	24,49%
5.01	03.2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	110.000	4 dokumen	77.500,00	-32.500,00	-29,55%
5.01	03.2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Laporan	10.000	5 Laporan	59.500,00	49.500,00	495,00%
5.01	03.2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	280.000	2 laporan	423.200,00	143.200,00	51,14%
5.01	03.2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	100%	450.000	100%	450.000,00	0,00	0,00%
5.01	03.2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	205.000	1 dokumen	205.000,00	0,00	0,00%
5.01	03.2	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Laporan	40.000	5 Laporan	40.000,00	0,00	0,00%

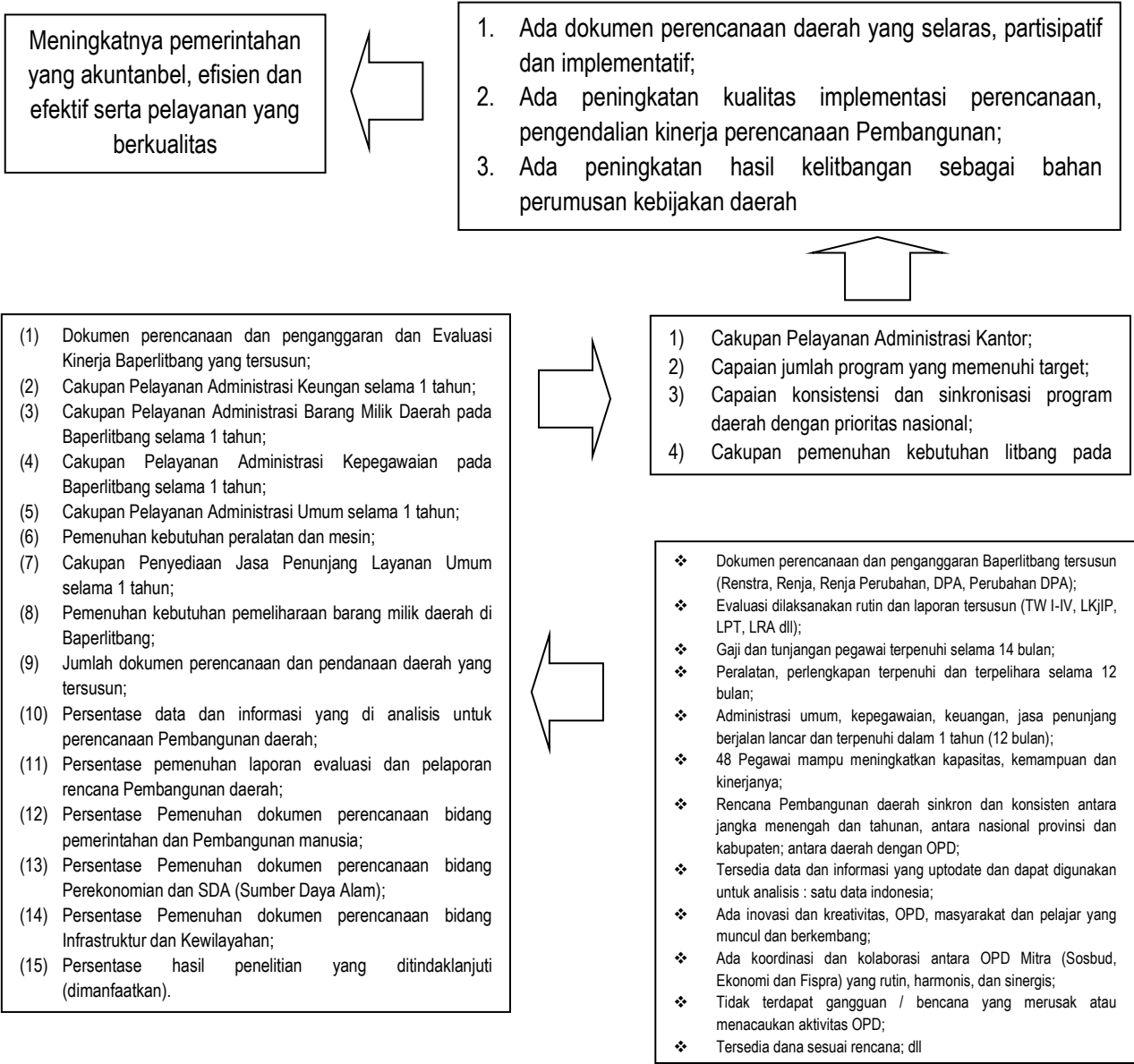
NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Rp	%
							(Rp. 000)		(Rp. 000)		
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
5.01	03.2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dab Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 laporan	205.000	1 laporan	205.000,00	0,00	0,00%
5.01	5			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	57	550.000	57	650.000,00	100.000,00	18,18%
					Persentase inovasi yang diimplementasikan	78		78			
5.05	02.2	01		Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	57%	50.000	57%	50.000,00	0,00	0,00%
5.05	02.2	01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	7 dokumen	50.000	7 dokumen	50.000,00	0,00	0,00%
5.05	02.2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	78%	500.000	78%	600.000,00	100.000,00	20,00%
5.05	02.2	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	8 dokumen	500.000	8 dokumen	600.000,00	100.000,00	20,00%

Sumber : Baperlitbang, 2023

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Baperlitbang, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas.. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Baperlitbang, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 3.1
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Baperlitbang Tahun 2024

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	4	4	4
2	Kegiatan	16	16	16
3	Subkegiatan	43	44	45
4	Jumlah Dana	8.217.088.439	8.417.088.439	9.075.259.080

Sumber : Baperlitbang, 2024

Perubahan Renja 2024 direncanakan :

- 1) Ada penambahan 1 subkegiatan yaitu : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berupa aktivitas peningkatan kapasitas aparatur (*Capacity buildings*) luar pulau jawa, dengan alokasi dana sebesar Rp. 225.774.000,- yang melibatkan lebih kurang 40 orang terdiri ASN dan Non ASN;
- 2) Ada penambahan dana sebesar Rp. 658.170.640,- yang terutama karena:
 - a. Subkegiatan Penambahan gaji pegawai Rp. 290.239.140,- untuk mencukupi kebutuhan selama 14 kali pembayaran;
 - b. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, sebesar Rp. 225.774.000,-
 - c. Subkegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, untuk penyusunan Grand Desain Kependudukan sebesar Rp. 50.000.000,-
- 3) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2024.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja Baperlitbang Tahun 2024 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Baperlitbang, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Baperlitbang.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Baperlitbang Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
- 2) Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024;
- 3) Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2024, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Baperlitbang, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;

- 4) Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2024 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
- 5) Perubahan Rencana Kerja Baperlitbang Tahun 2024 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, September 2024

KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730614 199303 1 002